

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, Peneliti memberikan beberapa poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan meresmikan Peta Laut Natuna Utara pada 2017 dengan tujuan untuk mempertegas batasan-batasan wilayah perairan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Sehingga tidak terjadi klaim wilayah yang tumpang tindih seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara yang bertabrakan dengan *Nine Dash Line* milik China. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di kawasan maritim baik di wilayah kedaulatan maupun di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Wilayah Laut China Selatan merupakan merupakan wilayah rentan terjadi konflik teritorial. Laut China Selatan itu sendiri berbatasan dengan 5 negara Asia yaitu: Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan yang disebabkan oleh Claimant State dan pembuatan *Nine Dash Line* yang dilakukan sepihak oleh China Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan keputusan bahwa China tidak memiliki dasar hukum atas klaimnya di wilayah Laut China Selatan. Namun, pemerintah China tidak menerima keputusan Mahkamah arbitrase tersebut.

China memberikan respons terkait diresmikanya peta untuk Laut Natuna Utara. Respons yang diberikan China melalui kebijakan politik luar negerinya bersifat ambigu. China mengatakan bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam negara yang melakukan klaim atas Laut China Selatan. Namun berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari pangkal pantai. China memberikan tiga bentuk respons diantaranya yaitu:

Respons Koersif, Respons ini dilakukan oleh pemerintah China dengan tetap memaksakan kehendaknya untuk berdaulat di wilayah Laut China Selatan dengan Nine Dash Line. Respons Koersif yang dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer. Hal ini ditunjukkan China di kawasan Laut Natuna Utara untuk menentang Wilayah ZEE sebagai wilayah Indonesia. China dalam hal ini menekankan bahwa Nine Dash Line tetap menjadi wilayah teritorialnya. Meskipun China sudah mengetahui keberadaan Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia dengan dasar UNCLOS 1982, China tetap melakukan aktivitas di wilayah Laut Natuna Utara yang masuk kedalam teritorial China. Menurut mereka masih memiliki hak untuk berlayar dan mencari ikan di wilayah tersebut.

Respons Persuasif, China memberikan statement guna meyakinkan Dunia Internasional, Khususnya Indonesia bahwa di Laut China selatan memang merupakan wilayah kedaulatannya. China menekankan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha (Spratly) dan juga Hak atas perairan di wilayah Kepulauan Nansha. Presiden Xi Jinping Juga memberikan Pernyataan bahwa ia menyarnkan agar Negara-Negara tetangga mengubah sikap antagonismenya menjadi sebuah sinergi, permusuhan menjadi sebuah persahabatan. Presiden Xi juga menyampaikan untuk membentuk komunitas dengan takdir yang sama untuk umat manusia. China menyatakan bahwa ia hanya ingin menangkap ikan di perairan yang menurutnya memiliki hak sejarah (Traditional Fishing Ground). China juga mengakui bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam Negara yang ikut serta dalam Klaim Laut China Selatan.

Respons Proaktif, Respons Proaktif yang diberikan China cenderung mempertimbangkan banyak hal untuk merespons protes-protes yang muncul di sekitar kawasan Laut China Selatan. China juga cenderung memberikan banyak solusi dan tidak terlalu menyuarkan konflik. Hal tersebut dilakukan China guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Mempertahankan hubungan kerjasama antara China dan Indonesia harus lebih diutamakan, oleh sebab itu China bersikap Proaktif dalam sengketa yang terjadi di Natuna. China menempati peringkat ke 4

dalam urutan negara yang berinvestasi di Indonesia dengan jumlah total investasi USD 20.839 miliar. China menunjukkan sikap yang bersahabat dengan tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia meski terjadi konflik di Laut Natuna Utara. Ketiga bentuk respons tersebut dikeluarkan oleh China tentunya dengan berbagai pertimbangan dan kepentingannya dengan Indonesia, khususnya di bidang kerja sama Bilateral.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat mengambil garis besar bahwa meskipun dengan adanya konflik yang terjadi di wilayah Natuna Utara, China memutuskan untuk tidak mengambil langkah agresif dan bermusuhan dengan Indonesia. Sehingga Respons yang diberikan China dapat terukur melalui kebijakan luar negeri yang dilakukan Pemerintah China.

5.2 Saran-saran

Respons China terhadap kebijakan Indonesia di laut Natuna Utara memiliki sifat yang ambigu. Disatu sisi china memberikan Respons yang agresif di kawasan perairan Natuna Utara, namun China juga tetap bebrikan dukungan dalam kerjasama bilateral dengan Indonesia. Untuk itu, peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

Berdasarkan data yang disajikan, pemerintah Indonesia sebaiknya terus memperkuat kebijakan yang telah diambil untuk mempertegas batasan-batasan wilayah perairan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sebaiknya terus memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di kawasan maritim wilayah kedaulatan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sesuai dengan yang telah direncanakan

Untuk menghadapi respons yang diberikan oleh China terkait meresmikannya peta Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia sebaiknya tetap menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut, terutama dari respons koersif China yang dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sebaiknya terus mempertahankan posisi Indonesia terkait hak-hak Indonesia di wilayah ZEE yang diakui oleh UNCLOS 1982.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sebaiknya tetap terbuka untuk melakukan dialog dengan China, baik melalui forum regional maupun melalui mekanisme konsultasi politik bilateral. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama terkait dengan permasalahan yang ada.